

SEMETON MAMPU

ASPIRASI UNTUK PERUBAHAN



EDISI 1 TAHUN I 2015

SEMETON MAMPU

ASPIRASI UNTUK PERUBAHAN

DARI REDAKSI

SUSUNAN REDAKSI

Pimpinan umum :
Sub Office Bakti MAMPU NTB

Pimred : Rudi Hidayat

Redaktur : 1. Nurjanah
2. Asep Suherman SH
3. Darma Santosa

Reporter : Anggota Forum Media

Tim Redaksi : 1. Nurjanah
2. Jaya mundra
3. Bq. Falmayani Indira
4. Cahya Kartika

Layout : Sopiyan HK

Penanggungjawab Distribusi :
1. Triyati
2. Hutami Ahadiyansyah
3. Bq Wirna Muharromy

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Meninting Raya No. 26 Kekalik – Mataram
Tlp/Fax : 0370 - 634527



RAPAT REDAKSI: Rapat Redaksi Semeton MAMPU di Golden Palace Hotel

Alhamdulillah, SEMETON MAMPU untuk pertamakalinya terbit dan hadir sebagai wadah komunikasi, informasi dan interaksi antara BAKTI NTB, jaringan dan konstituen. Selama ini kita selalu menekankan pentingnya dialog dan silaturahmi untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Dialog dan silaturahmi yang merupakan penjabaran program, aksi dan refleksi tersebut kadang berlalu begitu saja dan nyaris tanpa dokumentasi dan publikasi, sehingga apa yang ada di sini dan kini tak dikenal dan diketahui di tempat yang lain pada masa kini dan masa yang akan datang. Untuk menjembatani jarak dan waktu, SEMETON MAMPU, lahir dan hadir untuk berkisah dan bertegur sapa. Saudari-Saudara pembaca yang berbahagia, kehadiran kami tentu tidak untuk pertama dan terakhir, kami bertekad untuk tetap eksis. Sehingga semua aksi dan refleksi di lapangan bisa menjadi otokritik dan kritik membangun bagi kita semua untuk perubahan yang lebih baik.

Oleh karena itu, rubrikasi yang kami tampilkan masih jauh dari baik dan perlu perbaikan di masa yang akan datang. Namun sebagai dokumentasi dari kegiatan, pemikiran dan perenungan yang mendalam, kami optimis semua pemikiran yang (mungkin) terserak bisa kita rangkai dan rangkum kembali.

Lima isu MAMPU, yakni ;

1. Membuka akses perempuan miskin kepada program perlindungan sosial pemerintah.
2. Membuka akses perempuan kepada pekerjaan dan menghapuskan diskriminasi di tempat kerja.
3. Meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan ke luar negeri.
4. Meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk kesehatan reproduksi yang lebih baik.
5. Meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

diharapkan tidak saja jadi perjuangan kami tetapi menjadi perjuangan kita semua. Dengan demikian SEMETON MAMPU diharapkan menjadi mata, telinga dan corong pertama dan utama bagi pembangunan.

SEMETON MAMPU yakin bahwa perjalanan kami masih panjang, namun jalan panjang ini tak akan membuat kami lelah untuk setapak demi setapak, selangkah demi selangkah melaluinya. Tegur, sapa, kritik dan saran tentu kami butuhkan agar kita tumbuh dan berkembang, seiring sejalan. (*)

REDAKSI SEMETON MAMPU menerima kiriman naskah berupa artikel, foto, berita, karikatur, opini, gambar dan grafis. Redaksi berhak mengedit naskah sejauh tidak mengubah substansi tulisan. Naskah yang masuk menjadi milik Redaksi dan Redaksi tidak bertanggungjawab terhadap isi tulisan tersebut. SEMETON MAMPU Diterbitkan Sub Office BAKTI NTB bersama Forum Media dengan dukungan PEMERINTAH AUSTRALIA.



Saling Berbagi dan Percaya Pada Perubahan

Oleh : Bq. Falmayani Indira (Po Kota Mataram)

Berkumpul dan bercerita sudah hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat, Namun ketika mereka berkumpul untuk membicarakan persoalan bersama dan mencari solusi apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang luar biasa. Ini dilakukan oleh Forum Konstituen Kota Mataram Pasca kegiatan Penguatan Kelompok.

Dengan terbentuknya Forum Konstituen yang bisa dijadikan pusat komunikasi, pembelajaran, informasi, pengaduan dan advokasi masyarakat ini dalam perkembangannya telah menginisiasi pertemuan bulanan untuk berbagi informasi tentang pengaduan warga. Salah satunya Kelurahan Kebun Sari yang mulai bergerak ketika menerima laporan dari warga yang mengeluhkan beras raskin yang diterima berkutu dan bau. Merespon dari pengaduan warga, ketua kelompok konstituen Fathul Arifin alias Oting mengumpulkan pengurus kelompok Konstituen untuk menentukan langkah apa yang akan mereka lakukan mengatasi persoalan masyarakat. Pengaduan ini juga disampaikan ke kepala lingkungan dan Lurah dalam musyawarah warga yang kemudian bersepakat untuk mendatangi pihak Bulog secara bersama-sama. Langkah advokasi pengurus kelompok Konstituen Kebun Sari dengan mendatangi pihak Bulog untuk menyampaikan keluhan masyarakat diekspose disalah satu media lokal.

Alhasil adanya kesepakatan antara Bulog dengan pihak Kelurahan apabila beras yang diterima tidak layak konsumsi atau buruk bisa ditukarkan dengan beras yang lebih baik. Upaya advokasi yang dilakukan oleh Pengurus kelompok konstituen Kebun Sari menjadi contoh langkah advokasi bagi kelurahan lain.

Persoalan lain juga terjadi di Kelurahan Ampenan Utara setelah menerima pengaduan dari salah satu warga yang melaporkan pembuatan Kartu Keluarga yang ditahan oleh RT setempat karena tidak mampu membayar uang tebusan sebesar Rp. 200.000. Melalui ketua konstituen Ibu Hanis Ariyana langsung mendatangi RT untuk mengkomunikasikan bahwa prosedur pembuatan KK tidak dikenakan biaya. Namun apa yang disampaikan Ibu Hanis membuat RT marah dan mengancam untuk melakukan kekerasan kalau Ibu Hanis mencampuri urusan RT. Ancaman itu tidak membuat Ibu Hanis gentar dalam mengawal pengaduan warga. Ibu Hanis menyampaikan pengaduan warga ini ke pihak kelurahan dan dari pihak kelurahan melakukan upaya mediasi sehingga kasus ini bisa didamaikan. Dua contoh kasus diatas hanya segelintir dari berbagai permasalahan yang dialami warga. Pengawasan pengaduan warga tidak selamanya berjalan mulus tapi penuh dengan rintangan dan hambatan, namun dengan tekad yang ikhlas membantu masyarakat mereka tidak pantang menyerah demi kemanusiaan. Apa yang dilakukan Forum Konstituen membuktikan dengan berkumpul, berdiskusi dan bergerak bersama tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan. Tentu hal ini akan berdampak pada suatu perubahan yang lebih baik. (*)

DAFTAR ISI	1
LAPORAN UTAMA <i>MAMPU Perkuat Keberadaan Forum Aspirasi Kota Mataram</i>	2
LAPSUS MATARAM	6
LAPSUS LOTIM	8
LEGISLATOR <i>Meja Parlemen Untuk Para TKI Wakil Perempuan di Parlemen Lotim Menurun</i>	10
SUARA KONSTITUEN <i>Membela Warga Demi Dapatkan Raskin Bagus Tidak Risih, Tidak Takut Tertular</i>	12
OPINI <i>Perempuan dan Kemiskinan Dalam Perspektif Media Membangun Gerakan Advokasi Berbasis Komunitas (Di Kota Mataram)</i>	14
GALERY	16
AKSI MAMPU <i>Ketua Panitia Diskusi Publik</i>	18
MERIAP <i>Menikmati Tahu Fantasi</i>	20
MAMPU DALAM BERITA	

MAMPU Perkuat Keberadaan



DIALOG : Pembentukan forum aspirasi melalui dialog intensif

Melalui pertemuan secara regular, MAMPU terus menajamkan nota aspirasi terkait persoalan-persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Kota Mataram. Pertemuan dilakukan 28 April 2015 lalu, di Fave Hotel Mataram, dengan menghadirkan fasilitator Hendriadi SE.

Nurjanah, Koordinator Sub Office BaKTI NTB mengatakan tujuan pertemuan ini untuk mempertajam nota aspirasi yang telah disusun oleh Tim penyusun Kota Mataram, yakni Hendriadi SE, Any Suryani SH Mhum, Yuni Riawati S.Sos dan Fauzi Yoyok SH.

"Jadi tujuan utama dan harapan kita agar mendapatkan masukan dari SKPD dan DPRD supaya dalam kita melanjutkan proses ini, antara SKPD dengan teman-teman yang terkait bisa fokus dan terbangun kesepakatan terkait solusi-solusi yang telah dihasilkan oleh Tim," papar Nurjanah.

Hendriadi sendiri menjelaskan bahwa forum aspirasi Kota Mataram sudah terbentuk, dengan Anis sebagai ketua dan Hirsan sekretaris, serta Ida bendahara. Mereka akan dibantu tiga kelompok kerja. Yakni,

pokja analisis dan pengaduan, pokja data informasi dan komunikasi serta pokja advokasi.

"Sudah barang tentu jika topiknya penguatan maka pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama-sama, yaitu hal-hal apa yang perlu diperkuat. Apakah peran dan fungsi dari struktur itu sendiri atau agenda-agendanya," jelas Hendriadi. Pertanyaannya, apa yang harus diperkuat untuk bisa mencapai misi terwujudnya kebijakan dan anggaran yang responsive sensitive gender di Kota Mataram?. "Untuk mendorong itu kira-kira dari struktur ini apa yang ingin kita perkuat, apakah strukturnya, fungsinya atau perannya," tambahnya.

Ibu Hanis Ariyana selaku Koordinator Forum Aspirasi mengucapkan terima kasih yang diberikan MAMPU yang telah memfasilitasi kami menyiapkan forum ini bisa berangkat dan bekerja sesuai visi misi yang kami makan jalani, walaupun penjiwaan dan pendalaman terhadap visi misi belum sepenuhnya kami pahami dengan detail. Kami tadi sudah berkomunikasi dengan pak Hirman selaku sekjen forum aspirasi dan koor

dinasi pada pengurus lainnya. Jadi sebenarnya kami belum bisa banyak berkontribusi dikarenakan konsolidasi dan koordinasi antar pengurus belum maksimal serta kegiatan rutin belum terjadi.

Untuk itu penting kita dapat saling mengatur waktu sehingga persiapan yang dilakukan bisa lebih matang. Kemudian yang ingin dipertajam dalam penguatan ini terkait pengarahannya - pengarahannya apa saja yang harus dilakukan oleh pokja – pokja karena kita punya kelompok-kelompok konstituen kemudian tingkat Kecamatan sampai pada forum aspirasi jadi lingkaran informasi itu bisa jalan dan pokja pokja ini bisa memposisikan dirinya disitu supaya tidak terjadi putus komunikasi antara teman-teman yang diatas dan dibawah, jadi bagaimana kita melakukan konsolidasi dibawah sehingga forum ini bisa berjalan.

Pengacara Selly SH menambahkan, kalau forum itu bisa jalan tentunya kondisi dan tupoksi masing-masing dan apa saja yang perlu dilakukan bersama serta siapa yang bertanggungjawab. Saya setuju sebagai ketua tugasnya ABCD tapi tugasnya juga

Forum Aspirasi Kota Mataram

bisa bekerja bersama sekretaris dan pokja lainnya.

Tapi tentunya kita harus paham juga tugas masing masing agar tidak tumpang tindih, supaya memang betul betul jelas walaupun nantinya yang bekerja bisa bersama tapi tetap harus tetap ada yang bertanggung jawab.

Aktifis perempuan Zuliatina mendapatkan informasi terkait forum ini walaupun baru ikut satu kali, kalau menurut saya bagaimana kita mampu menggerakkan seperti yang diusulkan oleh ibu Selly kemudian yang penting juga bagaimana kita menggerakkan forum ini. Hendriadi SE yang jadi fasilitator menegaskan kehadirannya semua disini untuk memahami bersama sama jadi jangan sampai visi misi itu datangnya dari luar. Jadi kita berangkat dari titik a ke titik b sudah punya rencana. Kita sudah ada 4 usulan dalam bentuk kegiatan internal kemudian memperjelas tupoksi dan dari Ibu Anis juga ada masukan

supaya kita dapat memahami terlebih dahulu serta

langkah dalam memberikan kontribusi positif terkait nota aspirasi yang telah dibuat.

Hirsan – Sekretaris Forum Aspirasi menerangkan sebenarnya sudah ada beberapa hal yang sudah kita bahas dengan pengurus di kantor MAMPU Bakti tentang tupoksi sesuai fungsi dan peran.

Pokja 1 :

- Menganalisa dan mengkaji pengaduan dari forum Kecamatan
- Klasifikasi pengaduan

Pokja 2 :

- Menghimpun data pendukung dan menyebarluaskan hasil pen

Tabel

Pokja Analisis	Pokja Data Informasi	Pokja Advokasi
Solidaritas Perempuan	Lombok Post	Lard (Mahmuda Kalla)
Pekka	Radar Lombok	KPI (Selly Sembiring SH)
KPP	Radar Mandalika	PPK (Zahratun)
Somasi (Hendriadi SE)	JMS	Fauzi Yoyok SH (LBH Padi)
	Aksi NTB (Oting)	

gaduan

- Mengklasifikasi data terkait 5 isu MAMPU.

Pokja 3 :

- Menyusun rencana dan strategi advokasi
- Mempersiapkan bahan advokasi tertulis
- Lobby, hearing, konsultasi

Karena nanti yang lebih banyak kerja adalah pokja jadi tugas tugas ketua dan sekretaris perlu diperjelas dan tupoksi utamanya untuk nanti diisi sama program. Sebagai sekretaris membantu koordinator dalam koordinasi setiap kegiatan Forum Aspirasi. Jadi yang perlu diperkuat menurut saya yaitu infrastruktur dan management tatalaksana.

Suryadi melihat jadi yang telah disepakati bersama ketika di awal pembentukan ada Koordinator Forum Kota Mataram dan dibawahnya ada pokja pokja dan disini yang belum di tindaklanjuti ke lembaga lain misalnya Lard, Solidaritas Perempuan, Pekka dan dan Lombok Post TV.

Huda mengatakan keikutsertaannya dapat informasi dari teman teman katanya sudah disepakati dan saya sendiri bergabung dibagian advokasi. Jadi kesediaan teman teman berada di mana juga akan disesuaikan kembali.

Forum Aspirasi Kota Mataram

Koordinator : Ir Hanis Ariyana

Sekretaris : Hirsan Taqdir

Bendahara : Ida Royani



TANGGAPAN: Aktifis LARD, Huda kritisi tentang pekerja perempuan.



PEMAPARAN : sebelum ditanggapi konsep tentang forum aspirasi dikaji secara mendalam

Pokja data dan informasi perannya sangat besar yakni pendokumentasian dan membantu koordinator, administrasi dan pengaduan dan fungsi utama merupakan konsolidasi.

Tupoksi Kelompok 1 : Analisis data dan Pengaduan

1. Menerima data dan pengaduan yang sudah ada dari (kelompok konstituen, forum kecamatan) setelah klasifikasi
2. Mengklasifikasi pengaduan menggunakan form kompilasi pengaduan
3. Pengolahan data statistik dan pengaduan menggunakan format tertentu
4. Analisis spesifik berdasarkan kasus dan tema 5 Isu MAMPU
5. Konfirmasi pendalaman hasil analisis melalui FGD dan wawan cara serta temu konstituen
6. Kompilasi hasil analisis menurut tema
7. Menyusun rekomendasi hasil analisis ke pokja advokasi dan pokja data infokom
8. Analisis data kegiatan melalui temu konstituen dan lain lain

Alur Tupoksi Kelompok 2 : Data Informasi Komunikasi

1. Menghimpun data data pendukung sesuai dengan 5 isu Mampu
 2. Menyebarkanluaskan hasil pengaduan dan data (publikasi media)
 3. Mengklasifikasi data pengaduan sesuai dengan 5 isu Mampu
 4. Menganalisis data kongkrit
 5. Koordinasi data dengan SKPD terkait (klasifikasi dan collection)
 6. Mengkomunikasikan data data yang masuk dan mendukung pokja yang lain
 7. Mengupdate data terbaru
- Tupoksi Kelompok 3 : Langkah-langkah menyusun rencana dan advokasi
1. Menerima masalah yang masuk melalui pokja 1 dan 2
 2. Advokasi kebijakan sesuai 5 Isu MAMPU
 3. Mengolah setiap masalah yang masuk kemudian mengarahkan ke bidangnya masing masing (koordinasi dan konsolidasi)
 - 4.

Sumber

↓
Pokja 1

↓
Pokja 2

↓
Pokja 3

→ Sumber → Pokja 3 → SKPD dll

bu Lia berujar pokja pokja ini sebenarnya tidak berdiri sendiri jadi bisa saling mengisi antar pokja ini. Peran loby dalam hal ini untuk mengkomunikasikan peran peran yang ada. Jadi sebenarnya tugas koordinator juga bisa mengabungkan dari pokja yang telah terbentuk.

NurJanah menekankan Forum Aspirasi dalam proses pengaduan dari warga dan lain lain, misalnya ada informasi di luar forum tidak hanya yang mewakili di 15 Kecamatan dampingan. KPI basisnya ada di Mataram, ada SP yang bisa saling koordinasi dan merespon secara bersama sama. Teman teman lainnya dalam forum ini bisa bergabung jadi bukan hanya dari Bakti, misalnya ada kasus buruh migran yang ditangani oleh PPK , solidaritas perempuan serta teman teman yang lain sudah harus menjadi agenda bersama dan bagian dari MAMPU.

Visinya : Terwujudnya aspirasi warga dalam kebijakan yang responsive gender dalam penanggulangan kemiskinan Misinya : 5 Isu MAMPU Falmayani Indira

Setelah pertemuan tanggal 2 April ada tersusun rencana kerja Adanya

rencana kerja kelompoknya :

1. Adanya legalitas forum
2. Adanya roadshow ke jaringan NGO dan kita sudah ke Pekka, SP, Lombok Post TV, KPI
3. Penyusunan mekanisme kerja forum aspirasi
4. Hearing ke DPRD dan SKPD terkait
5. Pertemuan rutin 1 bulan sekali pada minggu ketiga

Mekanisme

Program untuk jangka pendek yang akan dilakukan (RTL) :

1. Penguatan kelembagaan (legalitas) bentuk dan legal formal
2. Roadshow ke jaringan NGO
3. Penyusunan mekanisme kerja forum
4. Publik hearing ke DPRD dan SKPD
5. Pertemuan rutin (1 kali satu bulan di minggu ke III)

Hirsan - Sekretaris Forum Aspirasi

Kita perlu adanya legalitas karena kita akan banyak bertemu dengan SKPD maka legalitas ini bentuknya ada akte notaris sehingga ketika kita bersurat tidak di pertanyakan kembali sebagai lembaga yang resmi.

Ibu Anis – Koordinator Forum Aspirasi menjelskan sumber data dari forum kecamatan akan masuk ke pokja 1, kemudian apabila dari NGO mereka sudah punya data kasus kasus persoalan apakah itu bisa masuk di pokja advokasi tapi tetap mengikuti alur untuk tersimpan di data. Karena di NGO sendiri sudah matang bagaimana membuat advokasinya sehingga kita bisa bergerak bersama atas nama forum aspirasi supaya lebih besar yang akan memperkuat kita untuk aspirasi.

Falmayani Indira

Jadi kalau kelompok 1 lebih kepada pengelolaan di tingkat komunitas dan pengelolaan pengaduan pengaduan yang langsung dianalisis dan menjadi bahan review sehingga bisa menjadi bahan untuk kelompok 2 dan 3. "Untuk kelompok 2 bisa sebagai data data pendukung. Jadi kelompok 1 juga menerima data pengaduan dari kelompok konstituen," paparnya. NurJanah mengatakan terkait tupoksi dan mekanisme sudah clear. Yang menjadi catatan

pentingnya bahwa di bayangan saya bahwa forum aspirasi ini adalah menghasilkan nota aspirasi karena dia menganalisis pengaduan serta mendorong sebuah kebijakan jadi jangan sampai forum aspirasi ini menghilangkan peran peran yang dilakukan oleh warga untuk meningkatkan sikap kritisnya.

Hendriadi

Jadi pada akhirnya semua kelompok akan menghasilkan produk nota aspirasi. Untuk kelompok 3 menurut kita ini sudah jadi dan tinggal di soundingkan ke DPRD. Untuk yang lain misalnya ada pengaduan yang membutuhkan respon segera kita siapkan. Agenda Nota Aspirasi :

Jadi hasil kajian tidak hanya sampai disini dan sosialisasi ini hasilnya akan menjadi bahan rujukan serta penyusunan kebijakan termasuk menyusun naskah akademik.

Nota Aspirasi :

1. Akan dibawa :

Pembahasan nota aspirasi di internal forum (minggu ke 2 bulan Mei)
Publik hearing ke DPRD (sesuaikan agenda DPRD minggu ke 3 Mei)

Publik hearing ke SKPD (RS)

2. Hasilnya untuk :

Sosialisasi / publikasi supaya orang tahu masalah masalah yang kaitannya dengan komunitas di Mataram

Sebagai bahan rujukan DPRD dalam penyusunan kebijakan

Acuon mengawal kebijakan yang dihasilkan DPRD dan Pemerintah Kota

Hendriadi SE menggarisbawahi segala sesuatu kebijakan itu lahir dari warga apa yang memang menjadi masalah bukan perdanya lahir dulu. Saya pikir pengalaman - pengalaman advokasi menjadi inspirasi jadi strategi advokasi berbasis nota aspirasi dan nota aspirasi menjadi senjata teman teman mau berbicara di Musrenbang, media atau kelompok masyarakat. Jadi advokasi berbasis bukti dan bukan omong kosong yang bisa diperjuangkan bersama. Terima kasih atas perhatian bapak ibu semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kelahiran forum aspirasi mampu menambah kekurangan yang masih ada. Amin. (*)



PERAN : Semua stake holder berperan sesuai kapasitasnya

Cegah Kekerasan Seksual Remaja

Perlu Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Posko Khusus



NARASUMBER : Baiq Diah, Warniati, Yuni Riwati dan Dr. Elly Rosila

Peringatan Hari Kartini di Mataram diisi dengan berbagai kegiatan, salah satu diantaranya adalah diskusi public yang digelar di LPMP Provinsi NTB dengan tema Seksualitas Remaja dan Upaya Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. Diskusi yang dipandu Yuni Riwati menghadirkan pakar dan aktivis perempuan yang diikuti ratusan pelajar, mahasiswa dan aktivis LSM ini sangat menarik untuk dikupas.

Koordinator Sub Mampu NTB, Nurjanah menyatakan kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Kartini, dimana hari kartini tidak diperingati dengan hanya mengenakan kebaya tetapi juga dengan melihat perjuangannya. Diskusi ini sudah direncanakan sebelumnya dimana ini adalah bagian dari pengaduan dari konstituen yang ada di Kota Mataram dan bermitra dengan DPD RI. Tujuan utama dalam kegiatan ini adalah, pertama mensosialisasikan berbagai bentuk kekerasan seksual untuk melakukan deteksi dini apabila hal tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Kedua, mensosialisasikan upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mencegah kekerasan seksual. Ketiga, mengetahui tips dan cara untuk menghalangi dan menghindari seksualitas di anak serta berbagi pembelajaran penanganan anak korban kekerasan seksual. Dan terakhir memberikan pendidikan kepada orang tua untuk mengatasi persoalan seksual kepada anak dan meningkatkan pemahaman peserta tentang pendidikan seksual anak dan remaja.

Dari Kembang Perindungan Anak NTB, Warniati dalam makalah berjudul Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah dan Upaya Penanganannya di NTB mengatakan sejak LPA berdiri 29 Maret 2002 dan banyak kasus yang didamping pada tahun 2013 ada 45 kasus, 2014 147 kasus dari 42 kasus kekerasan seksual dan ABH 48 dan masih banyak kasus lainnya.

“Kami akan fokuskan pada kekerasan seksual tidak juga dilakukan oleh orang dewasa kepada anak tetapi kekerasan seksual antar anak dan anak, orang tua kepada anak, ponakan kepada adiknya. Pada akhir 2014 kami sudah melakukan audien dan NTB ini sudah darurat kekerasan seksual anak, dan isu ini tidak disambut oleh pemerintah sehingga hanya dalam sehari saja isu ini mencuat maka kami butuh kebijakan juga untuk mengurangi angka kekerasan seksual anak, karena ini dilakukan juga melalui media sosial,” ujarnya.

Beberapa dasar kebijakan adalah :

- Segala kegiatan untuk menjamin/melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, & berpartisipasi sec optimal sesuai harkat/martabat perlindungan dr kekerasan, diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yg berkualitas, berakhlak mulia, & sejahtera (UU No 23/2002 ttg perlindungan anak)
- Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan & membentuk watak/peradaban bangsa yg bermartabat dlm rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan utk berkembangnya potensi peserta didik agar menjd manusia beriman bertakwa kpd Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yg demokratis serta bertanggung jawab” (UU No 20/2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional, psl 3)
- Tugas guru: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (UU No 14/2005, psl 1:1)

Kekerasan seksual di sekolah

- Bentuk kekerasan seksual: tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh korban yg berbentuk pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan yg berdampak trauma mendalam dan luka secara fisik., menimbulkan kerusakan fisik & mental.
- Dua jenis pelecehan seksual fisik: sentuhan yg bersifat sensual di area tubuh korban & tdk diinginkan korban. Pelecehan seksual verbal: kata-kata sensual (rayuan & komentar yg bersifat negatif) yg ditujukan kpd korban.
- Kekerasan seksual pada anak mengacu pada kegiatan melibatkan anak dlm kegiatan seksual, sementara anak tdk sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan.
- Usia korban disebut sbg anak di bawah umur adlh korban berusia kurang dr 18 th (UU No1/1974 tentang Perkawinan dan UU Perlindungan Anak).
- Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru, teman sebaya, tetangga, dan seterusnya.

Advokasi yang dilakukan LPA masih bersifat jejaring memang belum maksimal, maka perda yang ada diharapkan ada konsekuensi dari semua pihak bisa waspada dan lebih peduli. “Kekerasan seksual bukan lagi hal yang tabu, dimana kekerasan seksual sudah dilakukan melalui media internet, hp dan lain-lain. Ini sudah ada kasus di Lombok barat, bahwa sudah terjadi pada anak

karena tersebarnya foto-foto yang tidak baik di sekitar masyarakat,” tandasnya.

Umi Aiziati dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan makalah berjudul Kebijakan pemerintah dalam menanggapi kekerasan seksual di lingkungan sekolah menyampaikan materi mengenai apa saja yang akan dilakukan oleh dikpora untuk mengatasi dan mengurangi kekerasan seksual di sekolah.

Baru ada 2 PIK-R di madrasah, dimana ada perda juga sudah mengatur penggunaan jilbab bagi siswa. Kami juga akan melatih anak-anak sebanyak 10 orang untuk menjadi konsultan di sekolah sebagai pusat informasi kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi anak. “Salah satu upaya mencegah adanya pergaulan bebas dikalangan pelajar dan remaja terutama yang berujung kepada seks bebas maka sekolah agar meningkatkan pendidikan karakter dan keagamaan,” tandasnya. Anggota DPD RI, Baiq Diah Ratu Ganefi dengan makalah berjudul Peran DPD dalam mencegah kekerasan seksual remaja menyatakan akan bersama-sama memecahkan permasalahan ini, dan tidak boleh selesai sampai disini dan harus ada yang dihasilkan. Dimana seksualitas pada anak sangat memprihatinkan dan negara harus hadir disini, ini serius harus diselesaikan. Kami sudah membuat kaukus perempuan parlemen semoga ini menjadi yang terbaik buat kita.

DPD RI, hadir disaat Negara memerlukan. Fungsi dan wewenang DPD RI berbeda dengan DPR RI. Ada 122 fraksi dan memperjuangkan masing-masing dari konstituennya. Dalam fenomena kekerasan anak sudah sampai ke daerah-daerah dan Negara harus hadir pada saat ini, dimana dalam permasalahan apapun Negara harus hadir. Kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan kita, kenapa sampai seperti ini. “Semoga melalui forum ini kita akan membentuk tim kecil dan kami DPD akan memfasilitasinya dan kita akan menuntaskannya dan mendesak pemerintah provinsi dan

kab/kota untuk ikut terlibat, karena faktanya sudah banyak warga dan konstituen yang sudah melapor, dan mendesak juga kepada polda untuk segera menuntaskan persoalan kekerasan terhadap anak jika sudah ada yang melapor,” tandasnya.

Maka kita harus ada unit khusus untuk pengaduan terkait dengan kekerasan seksual kepada anak. Ada beberapa faktor dari terjadinya kekerasan seksual kepada anak apakah karena kemiskinan, kemudian karena pola hidup konsumsif dari anak maka yang penting ditanamkan di anak-anak kita adalah meningkatkan iman dan takwa kepada tuhan pendidikan agama sangat penting sedari dini ditanamkan kepada kepada anak. Maka DPD akan memanggil pemerintah provinsi dan kapolda bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Ada 3000 tanda tangan menolak anak 15 tahun untuk berkendara ke sekolah, saat ini saya akan hadir dalam setiap kegiatan yang ada di wilayah NTB. Maka melalui Mampu kita akan buat tim kecil, dan boleh menggunakan kantor DPD RI untuk berdiskusi.

Dr. Elly Rosila, SpKJ, MM, Direktur RS Jiwa Mutiara Sukma Prov. NTB

Mata rantai permasalahan seks pertama, karena rasa ingin tahu, penasaran, pengen coba. Dimana pada fase SMP SMA anak-anak memiliki rasa ingin tahu, maka penting kita memahami fase ini. Kedua kurangnya informasi dan ketiga kurang pengetahuan seksual pada anak dan masyarakat “Dimana orang tua tidak bisa mengontrol anak. Orang tua juga mendiskreditkan tentang seks dimana anak harus dibekali dengan berprilaku baik bagi anak laki-laki dan perempuan. Dimana hubungan seks antara laki-laki dan perempuan kerap ada paksaan dari pihak laki-laki,” jelasnya.

Ada tiga organ yang sangat istimewa dan hanya pribadi yaitu mulut, dada, dan bawah. Ini penting kita sampaikan kepada anak-anak dalam kesempatan yang baik seperti menon-ton, mengajak ngobrol anak.

Dalam berbicara dengan anak remaja harus menjadi komunikator yang baik dan bagaimana anak yang membuat keputusan. Pada anak harus di latih untuk disiplin dan pup pada toilet training, dalam fase golden anak akan lebih dekat dengan ibunya. Kemudian pada fase laten anak-anak akan mulai berkenalan dengan lawan jenis, dimana reproduksi sudah masa matang. Dalam membangun komunikasi dengan anak, maka harus dilakukan komunikasi dua arah yang efektif dan efisien sebaiknya dilakukan antara orang tua dengan anak. Karena sekarang eranya sudah beda, informasi sudah dengan mudah didapatkan oleh anak.

Kepala Lingkungan Sukaraja Ampenan, Suparman sebagai peserta hanya memberikan beberapa pesan juga, saya prihatin dengan judul seminar hari ini, dimana tahun 2015 sudah menemukan 4 bayi sudah dibuang dan ada anak usia 17 tahun yang hamil diluar nikah. “Dimana dalam kekerasan seksual tidak serta merta dapat hamil, maka upaya pencegahan adalah untuk memberikan perhatian ekstra ketat kepada anak,” pintanya.

Aktivis LARD, Susan mempertanyakan penyampaian yang menceritakan bahwa anak-anak sekolah sudah sangat mengenal mengenai seks sesama pelajar, bagaimana?

Teti Pariah dari Dinas Kesehatan: saya sangat apresiasi kegiatan ini, kami di dinas kesehatan juga sudah melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja dari SMP dan SMA dimana sangat rendahnya pemahaman remaja terhadap organ seksualnya. Maka kami minta kepada dikpora dimana seks education sudah mulai dilakukan sejak dini sehingga anak-anak bisa memahami dan menjaga dirinya, desain seks education di kurikulum yang mudah dipahami anak. Kemudian kepada LPA bagaimana mendampingi korban kekerasan seksual karena anak yang sudah mengalami korban seksual di sekolah malu kembali ke sekolah. Aktivis Jaringan Masyarakat Sipil, Ilham mengatakan persoalan ini tidak terlepas dari hubungan Negara dengan warganya, dimana Negara tidak boleh lepas dari tanggungjawab terutama kekerasan pada anak karena pendidikan kepada warga masih kurang. Dalam UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, lebih berbicara menyikapi kasus perkasus tidak dibicarakan cara pencegahannya, maka kepada DPD langkah yang mesti ditambah adalah upaya bersama untuk edukasi dalam meningkatkan pemahaman warga dan tidak hanya pencegahan dengan CCTV saja tapi juga dengan pendidikan pemahaman kepada warga.

Elly berujar edukasi seksual memang harus dilakukan sedini mungkin, dimana di pendidikan dini diberikan edukasi begitu juga dengan guru bagaimana membangun komunikasi dengan anak dan memang 5 tahun pertama adalah usia yang paling penting dalam pendidikan seks pada anak. Serta membangun pola komunikasi dua arah dengan anak, orang tua juga harus memahami pola komunikasi di media social anak kita. (*)



SERIOUS : Peserta dialog publik serius mendengarkan narasumber

Akomodasi Persoalan Perlu Banyak Pos Pengaduan



AKRAB : Ketua DPRD Lotim dan anggota berpose dengan ketua forum aspirasi masyarakat Lotim

Setelah terbentuk Forum Aspirasi Masyarakat Lombok Timur, organisasi ini terus bergerak untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Lombok Timur bersama stakeholder lainnya. DPRD Lombok Timur sebagai wadah penampung aspirasi juga menjadi mitra dari Forum untuk terus memperjuangkan, membela hak-hak masyarakat Lotim untuk maju dan berkembang. Berikut hasil hearing forum dengan DPRD Lotim yang dipandu Jaya Mundra.

Ketua DPRD Lotim, H Khaerul Rizal ST menyatakan satu niat kita bersama adalah meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu maka semua elemen harus bekerja sama. "Jangan mengandalkan pemerintah saja karena kalau kita melihat dari dana yang ada itu masih sangat kurang sehingga setiap program-program yang di gelontorkan harus benar-benar tepat sasaran. Sehingga dalam hal ini, tentunya kami anggota DPRD membutuhkan seluruh pihak untuk ikut bersama-sama didalam membangun kehidupan masyarakat lombok timur yang lebih sejahtera. Dan BaKTI MAMPU ini sudah tepat sekali menjalankan program-programnya karena nanti ketika pembahasan APBD itu benar-benar hasil dari serapan dari masyarakat di tingkat bawah," katanya.

Sehingga sangat pas waktunya Yayasan BaKTI MAMPU memberikan sumbangsih atau memberikan saran ataupun berbagi program kepada kita dan mudah-mudahan itu menjadi bahan masukan untuk kami se

hingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa terwujud. Kami dari anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur mengucapkan terimakasih kepada Yayasan BaKTI MAMPU karena sudah mengadakan kegiatan ini.

Ketua Formastim, Salmiwati mengatakan dari beberapa persoalan-persoalan yang kami temukan di tingkat bawah sudah seharusnya ada wadah atau tempat pengaduan masyarakat yang bisa merespond permasalahan-permasalahan mereka sehingga alhamdulillah melalui Sub Office Yayasan BaKTI melalui program MAMPUnya terbentuklah suatu wadah yang kami beri nama Forum Aspirasi Masyarakat Lombok Timur. Dimana wadah ini bisa menjadi tempat berkeluh kesahnya masyarakat yang dari tingkat bawah. Dan program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) ini bermuara di tiga kecamatan yaitu di kecamatan Aik Mel, Kecamatan Selong dan Kecamatan Labuhan Haji dan di tujuh desa dan enam kelurahan.

"Tujuannya adalah kebijakan-kebijakan yang muncul itu tidak dari atas kebawah tetapi memang betul-betul apa yang di inginkan oleh masyarakat di tingkat bawah itulah yang membunmi. Jadi bukan hanya dari eksekutif maupun legislatif yang bekerja sama tetapi kami juga dari Formastim mempunyai komitmen untuk bekerja bersama-sama," tegasnya.

Nota aspirasi ini adalah berdasarkan dari 5 isu MAMPU yaitu, pertama membuka Akses Perempuan Miskin Terhadap Program Perlindungan Sosial Pemerintah. Kedua, mem

buka Akses Perempuan Terhadap Lapangan Pekerjaan Dan Penghapusan Diskriminasi di tempat Kerja, ketiga meningkatkan Kondisi Tenaga Kerja Perempuan ke luar Negeri. Keempat, meningkatkan Kepemimpinan Perempuan Untuk Kesehatan Reproduksi Yang Lebih Baik dan kelima, meningkatkan Kepemimpinan Perempuan Untuk Pengurangan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Anggota Formastim, Baiq Sumiati mengatakan ada beberapa hal yang perlu saya informasikan. Yang pertama adalah dulu ketika presiden kita sebelum menjabat sebagai presiden. Kita sudah sama-sama pernah mendengar tentang isu-isu dari Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetapi nyatanya sampai sekarang belum juga kita rasakan manfaatnya. Dan masyarakat dalam kondisi seperti ini mereka tidak tahu kemana untuk mendapatkan kartu-kartu tersebut atau kemana mereka harus mengadu.

Kemudian yang kedua adalah katakan saja pada program kesehatan yang digelontorkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Katanya program itu dihajatkan untuk masyarakat tetapi kebanyakan dari masyarakat kita apa lagi yang tinggal di pedesaan itu tidak tahu tentang program-program pemerintah itu. Kalau sudah tidak tahu mana mungkin masyarakat itu bisa mengaksesnya. Sedangkan petugas-petugas yang tahu bagaimana aksesnya pasti semua keluarganya mendapatkan bantuan itu. "Oleh sebab itu kami mengharapkan nantinya kalau memang ada program-program yang sejatinya untuk

masyarakat, tolonglah disosialisasikan ke tingkat bawah supaya masyarakat itu tahu bagaimana cara untuk mengakses bantuan tersebut,” tandasnya. Hami, anggota Formastim menambahkan dari beberapa permasalahan yang ada di bawah, yang paling mendasar itu adalah soal data. Jadi validasi data itu sangat penting karena bagaimana-pun suatu program itu bisa berjalan maksimal apabila data yang dipergunakan itu benar-benar real. Contoh, pada program raskin sebenarnya tujuan dari program itu adalah untuk orang-orang yang memang benar-benar membutuhkannya. Tetapi kenapa kemudian raskin itu di bagi rata. Sehingga didalam memvalidasi data itu penting ada Perda ataukah yang lainnya sehingga ketika ada masalah soal data, itu bisa diselesaikan. “Dan juga di desa-desa itu harus ada tempat pengaduan sehingga ketika masyarakat itu ada masalah mereka bisa mengadukannya dan aduannya itu bisa direspon,” ujarnya.

Kemudian yang kedua adalah pada program JKN, bagaimana masyarakat itu bisa membayar iuran sedangkan menginjakkan kaki di kantor desa pun ada yang tidak pernah. Jadi kami mengharapkan adanya petunjuk sederhana sehingga akses mereka itu bisa mengena. Dan saya setuju dengan apa yang di sampaikan oleh rekan kita tadi bahwa di setiap program yang akan digelontorkan itu harus di sosialisasikan supaya masyarakat itu tahu. dan ricuhnya program-program ini, itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi program ke desa-desa. “Mohon maaf, bukannya kita berperasangka buruk tetapi kadang-kadang kepala desa

saja tidak tahu bahwa ada program ini itu di desanya. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi, tidak lain karena masih kurangnya sosialisasi program ke desa-desa. Oleh sebab itu kami mengharapkan penting adanya pengawasan dari daerah terkait dengan program-program yang ada,” jelasnya. Bendahara Formastim, Sumiati melihat ada beberapa permasalahan yang ditemukan di tingkat bawah terkait dengan isu yang pertama yaitu akses perempuan terhadap program perlindungan pemerintah. Pekerja perempuan belum mendapatkan perlindungan persalinan didalam akses pekerjaan.

Perempuan masih bekerja dua atau tiga minggu sebelum melahirkan padahal pada kondisi itu perempuan sudah tidak memungkinkan untuk bekerja. Kemudian juga pekerja perempuan itu tidak diberikan hak cuti pasca melahirkan, mereka disuruh bekerja hanya berselang dua minggu setelah melahirkan.

M. Ihsan Darma Santosa, anggota Formastim menyoroti kalau turun ke sektor-sektor informasi dimana perempuan-perempuan kondisinya jauh dari perilaku manusiawi. Kenapa demikian, contoh di salah satu wilayah kita di Kabupaten Lombok Timur ini perempuan-perempuan itu bekerja tetapi upah yang mereka dapatkan itu sangatlah kecil dan ketika dia tidak bekerja maka dia tidak akan mendapatkan upah padahal mereka sudah bekerja sangat lama dan itu-itunya saja yang dikerjakan. “Yang kami inginkan adanya pengawasan atau peraturan dari pemerintah didalam perilaku-perilaku yang seperti ini. Itu saja temuan kami dilapangan,” jelasnya.

Anggota Formastim, Saharudin sangat miris melihat kondisi TKI kita masih jauh dari apa yang diharapkan. Adapun permasalahan yang kami temukan di lapangan yaitu, kondisi TKI kita pada pra penempatan itu adalah, masalah informasi yang terbatas, kurangnya keterampilan, penipuan. Karena minimnya informasi yang didapatkan oleh para calon TKI maka penipuan-penipuan sering dilakukan oleh para calo di lapangan. Kemudian kurangnya keterampilan juga menyebabkan kondisi TKI kita semakin tidak baik. “Sehingga rekomendasi kita adalah adanya pengawasan untuk setiap calo-calo yang memberangkatkan TKI dan adanya anggaran untuk mengadakan pelatihan-pelatihan khusus kepada calon TKI yang akan berangkat. Karena kalau kita berbicara masalah anggaran untuk perlindungan TKI, maaf saja karena 0% anggaran dana untuk perlindungan TKI. Padahal TKI juga berkontribusi besar didalam membangun Lombok Timur ini,” kritiknya.

Bambang Suprayitno mencermati apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman peserta sedikit saja yang ingin dipertajam. “Keinginan besar kami adalah bagaimana bapak ketua DPRD dan bapak anggota untuk bisa menganalisis kembali anggaran dana yang diberikan kepada instansi terkait. Kemudian sesuai dengan tupoksi dari bapak/ibu dewan ini, kami mengharapkan adanya produk-produk UU yang dilahirkan yang berpihak besar kepada masyarakat-masyarakat,” pintanya.



Ketua DPRD Lotim H. Khairul Rizal bersama anggota menerima forum aspirasi masyarakat Lotim

Meja Parlemen Untuk Para TKI

Hj. Baiq Nurhasanah, salah satu wajah baru yang mengiasi warna Parlemen Kabupaten Lombok Timur. “Semuanya tidak serba tidak terduga” itu ungkapan yang tulus dari perempuan kelahiran Suralaga 1973 ini. Bagi dia menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bagi kehidupan perkampungan adalah pilihan mulya dan langka, mulya karena sektor ini menjadi salah satu pilihan untuk berikhtiar merubah nasib dan kesejahteraan. Dikatakan langka, karena cost menjadi TKI tidak sedikit, perlu memutar otak untuk bisa mencukupi biaya. Namun sektor tenaga kerja ke luar negeri tetap saja menggiurkan, kendati didepan beratus-ratus masalah siap menghadang.

Bagi Hj. Baiq Nurhasanah, kepergiannya menjadi TKW sejak tahun 1995 ke Arab Saudi juga bagian dari ikhtiar dan Iktiar itu dalam agama Islam bernilai ibadah, sepanjang niatnya untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Alumni pondok pesantren ini ingat betul ajaran di pesantren dulu menyatakan umat Islam sesungguhnya tidak diperkenankan lemah (Dhuafa) baik dari segi mental dan ekonomi karena ketika manusia lemah dari segi mental dan ekonomi, maka disanalah awal kolonialisme berlaku.

Setelah 4 tahun lamanya menjadi TKW di Arab Saudi, Hj Baiq Nurhasanah akhirnya pulang kampung, menikmati jerih payahnya ke luar negeri, tidak seperti kebanyakan TKI atau TKW, yang kehidupannya glamor mengikuti gaya hidup di mana negara tempat ia bekerja, Hasanah yang kerap menggunakan Jilbab Merah ini, rezeki yang dia dapat di Arab Saudi tidak lebih dari anugerah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan amanah, ia kemudian dipercayakan oleh kepala Desa untuk menjadi pendamping Program Nasional Pedesaan Mandiri (PNPM) Gerakan Hidup Sehat dan Cerdas (GSC) sebuah program pemerintah era Presiden SBY untuk Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Pekerjaannya sebagai pendamping desa, telah membuka lebar cakrawala berpikinya bahwa ternyata kecerdasan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sangat ditopang dari sejauh mana pengetahuan orang tua, terkait asupan gizi bagi anak-anak, seperti apa yang ia lakukan dan dia lihat ketika menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Arab Saudi, dimana orang-orang Arab sangat selektif terkait dengan pembe-



Hj. Baiq Nurhasanah

rian gizi putra-putri mereka.

Pengalamannya di Arab Saudi itupun dia tularkan habis, tidak jarang dia berdiskusi dengan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan, terkait teknis upaya menadarkan ibu-ibu terkait kesadaran Gizi dan kesadaran memberikan pendidikan kepada anak, bagi Orang tua dari Baiq Yuliza Lina, Baiq Salma dan Abdul Rajak ini.

AKTIVITAS DIDUKUNG SUAMI

Aktivitas sosial di PNPM GSC, yang dilakoni Nurhasanah didukung penuh oleh sang suami Lalu Purnama, kendati Sawah hasil jerih payahnya di Arab Saudi, membutuhkan tenaganya, Purnama mengikhhlaskan waktu isterinya berbuat sosial di tengah-tengah masyarakat, dengan catatan, kewajiban seorang ibu sebagai ibu dari anak-anaknya tidak boleh terabaikan. Bagi Purnama, apapun aktivitas kita, tidak boleh menghilangkan unsur pengabdian, termasuk mengurus anak, memenuhi gizi dan pendidikannya.

Baginya mendukung kegiatan isteri di luar kegiatannya sebagai penanggung jawab seorang ibu, adalah mulia. Sehingga ia terus meberikan support kepada isterinya bahwa mengabdikan diri kepada masyarakat jangan dilihat seberapa besar honor yang diberikan tim pengelola kegiatan namun bagaimana kita bisa berperan penting mengubah suatu keadaan yang kita anggap tidak ideal menjadi ideal, dan itulah muara sebuah pengabdian kepada masyarakat. DIDESAK; Kendati Sempat Menolak-Sepak terjang Nurhasanah di bidang sosial, mungkin bagi para pengamat sosial kecil, karena posisinya hanya seorang pendamping Di desanya, namun bagi

masyarakat Desa Suralaga Kecamatan Suralaga, Pengabdian yang dilakukan oleh Nurhasanah sangat berarti bagi mereka. Apa-apa yang dilakukannya tidak sekedar menuntaskan skedul teoritis, namun lebih dari itu, yakni perubahan prilaku ibu-ibu kader posyandu yang setiap saat dia dampingi.

Hal yang tidak diduga kemudian hari dia terpilih menjadi Anggota Dewan dengan perolehan suara cukup signifikan 1.492 Suara, mewakili Dapil satu yang terdiri dari Kecamatan Suralaga, Kecamatan Selong, Kecamatan Labuhan Haji dan Kecamatan Sukamulia. Medengar dia terpilih, dia dan sang suami tersungkur dalam sujud syukurnya, seraya meminta kepada Allah SWT untuk diberikan petunjuk agar amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat dapat diperjuangkan, dengan keterbatasan pengalaman yang dimilikinya.

KOMIT Perjuangkan Hak Perempuan dan Pendidikan

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah adalah minimnya Skil Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama disektor tenaga Kerja Wanita (TKW), Perusahaan Jasa Tenaga Kerja acapkali tidak peduli dengan dampak ekonomi dan psikologis ketika merekrut TKI. TKI yang minus skil tersebut, bahkan tidak sedikit perusahaan tenaga kerja (PJKTI) berlomba menawarkan berbagai menu, mulai dari pemberangkatan Pasca Bayar sampai pada tawaran yang membuat tidak sedikit Para Calon TKI (CTKI) tergiur, dan hal itu akan mengemuka dipermukaan bila mana Para TKI bermasalah di tempat mereka berkerja, mulai dari kasus pembunuhan majikan, lari dari visa kerja, dan berbagai kasus kriminal yang akrab kita dengar dan lihat di media massa. Kegelisahan tersebut juga dirasakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Nurhasanah, sebagai orang yang pernah menjadi TKI beberapa tahun silam, permasalahan Tenaga Kerja di luar negeri diakuinya sangat kompleks namun semuanya itu kembali pada persoalan skill tenaga kerja kita, kebijakan pemerintah untuk memoratorium Tenaga Kerja Wanita (TKW) khusus untuk Arab Saudi dan Malaysia, dinilai perempuan ini, sangat tepat, dengan catatan, jeda moratorium tersebut digunakan untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) (Marsoan dan Lalu Mujahidin)

Wakil Perempuan di Parlemen Lotim Menurun

Semeton MAMPU - Sejak bergulirnya era reformasi di Indonesia, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting eksekutif dan legislatif. Sampai saat ini keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat minim di Indonesia baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, termasuk di Kabupaten Lombok Timur hanya dua orang.

Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur, jika dibandingkan dengan periode 2009-2014 lebih banyak yakni 4 orang perempuan, sementara periode 2014-2019 hanya 2 orang atau menurun 50 persen. Hal ini tentu memberikan gambaran bahwa ternyata tingkat keterwakilan perempuan sangat rendah. Pada periode 2009-2014 dari segi kualitas maksudnya peranan, bahkan ada yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan.

Padahal, partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting, di mana dengan keberadaan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal, mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan yang ada di daerah maupun pusat.

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Lombok Timur pada pemilihan legislatif 2014 menunjukkan, jumlah pemilih perempuan di Lombok Timur lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki. "Ini menunjukkan kesadaran semua pihak mengenai makna dan peran penting di parlemen masih sangat rendah," ujar Ummi Syarkawi mantan Wakil Ketua DPRD Lotim periode 2009-2014, Senin (04/05/2015).

Untuk jumlah pemilih laki-laki sebanyak 391.233 orang, sedangkan perempuan 447.204 orang. Sementara partisipasi pemilih perempuan juga lebih tinggi jika dibandingkan perempuan. Jika partisipasi memilih perempuan sebanyak 83 persen, laki-laki hanya 71 persen.

Masih minimnya keterwakilan perempuan di parlemen menurut Ummi Syarkawi disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya, masih lemahnya sistem perekrutan oleh partai politik yang hanya menargetkan terpenuhinya kuota perempuan yang 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Faktor kedua adalah masih minimnya



Hj. Ummi Syarkawi

kesadaran perempuan mengenai makna penting dari keterwakilan mereka di parlemen, padahal kalau disadari jika perempuan memiliki wakil dari perempuan akan memberikan energi positif dalam membangun bangsa dan demokrasi yang lebih baik. Selain itu, kepercayaan pemilih perempuan terhadap sesama perempuan juga masih terlihat sangat kurang di samping dukungan partai juga tidak maksimal. Hal ini terlihat dari pemberian nomor saat pencalonan dan juga dana. Meskipun nomor sebenarnya tidak menjamin orang terpilih, tapi paling tidak mempengaruhi suara. "Nomor calon perempuan sebagian

besar biasanya ditaruh pada posisi yang agak sulit dicari pemilih," tukasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada semua partai agar memberikan nomor yang gampang ditemukan pemilih saat memilih. Selain itu partai juga harus benar-benar selektif memilih calon, yakni calon yang memiliki peluang untuk terpilih atau menang. "Jangan hanya sekedar mencalonkan perempuan untuk memenuhi syarat yang diatur undang-undang. Tapi rekrutlah perempuan yang potensial sehingga keterwakilan perempuan di parlemen bisa terpenuhi," harapnya. (sima dan salmi)

Tidak Risih, Tidak Takut Tertular

Leley Mariono, Kader Pendamping Penderita TBC

Di Desa Tempit, Ampenan Tengah, sosok Ibu Leley Mariono cukup terkenal di masyarakat setempat. Tentu saja, karena dalam kehidupan sehari-harinya, selama bertahun-tahun, ia menjadi pendamping para penderita TBC di kampungnya. Kerja sosial tanpa pernah digaji itu, telah ia lakukan sejak tahun 1986 hingga sekarang ini. Sebuah pengabdian tanpa pamrih yang luar biasa dari ibu beranak empat ini.

Semua orang tahu, penyakit TBC adalah penyakit menular dan mematikan. Stigma masyarakat, TBC itu sangat menakutkan. Tidak heran, penderita TBC selalu tampak dikucilkan dalam pergaulan. Alasannya jelas, mereka atau keluarga mereka tidak ingin tertular penyakit tersebut. Sebaliknya, bagi penderita TBC, juga dengan sendirinya menarik diri dari pergaulan. Mereka sadar, di luar sana para tetangga menjauhi mereka. Jadi, pilihan terbaik bagi mereka yang mengidap TBC, selalu berada dalam rumah. Pikir mereka, daripada dijauhi dan jadi bahan obrolan, ngumpet di rumah lebih terasa damai. Masalah lain adalah sikap sebagian orang yang juga menyembunyikan anggota keluarganya kalau ada yang mengidap TBC. Ini ironi, karena menyembunyikan anggota keluarga yang mengidap TBC tentu saja tidak akan membantu dalam menyembuhkan penyakit tersebut.

Namun, sebetulnya tidak semua masyarakat berpikir negatif. Ibu Leley, salah satu contoh. Batinnya, para penderita TBC itu harus dibantu. Masyarakat sah-sah saja menjauhi mereka, tapi setidaknya harus ada satu atau dua orang yang mesti peduli dengan penderitaan mereka.

Begitu pula, keluarga penderita tidak bisa semata-mata harus disalahkan karena menyembunyikan keluarganya yang sakit. Karena mereka juga memiliki alasan melakukan itu. Tetapi setidaknya harus ada yang bergerak untuk memberikan pemahaman kepada keluarga penderita. Di Desa Tempit, hanya Ibu Leley seorang yang



Lely

mencurahkan hidupnya mendampingi para penderita TBC di kampungnya. Tidak ada rasa jijik. Tidak pernah merasa takut akan tertular penyakit yang tergolong penyakit mematikan nomor satu terbesar dalam kelompok penyakit infeksi.

Ketika ditemui di kediamannya, Ibu Leley begitu bersemangat mengenang pengalamannya selama menjadi pendamping. "Saya menikmati apa yang saya lakukan ini. Saya melakukannya dengan ikhlas, sangat tulus ingin membantu menyembuhkan penderitaan mereka (penderita TBC)," ungkap Ibu Leley yang cuma seorang ibu rumah tangga.

Selama 29 tahun, setiap hari, Ibu Leley berusia 48 tahun, berkeliling kampung mencari warga yang menderita TBC. Ketika ada warga yang dilihatinya memiliki gejala penyakit seperti itu, maka Ibu Leley mencoba memberikan pemahaman bahwa penyakit mereka harus segera ditangani dokter.

"Kadang susah juga memberikan pemahaman. Ada saja warga yang menolak dikatakan sedang terjangkit TBC. Butuh kesabaran untuk menjelaskan kepada mereka," kata

dia. "Yang sudah di diagnosa menderita TBC pun, kadang suka menolak diajak berobat dan minum obat. Yaaa...pinter-pinter kita (pendamping, Red) membujuklah supaya mereka mau berobat dan rutin meminum obatnya," tambahnya.

Kini, jejak Ibu Leley sudah menurun ke empat buah hatinya, tiga laki-laki – satu perempuan hasil perkawinannya dengan Mariono. Putra sulung kini bekerja di rumah sakit Kota Mataram. Putra kedua dan ketiga sedang mendalami Ilmu medis secara formal di sekolah perawat. Anak terakhir, perempuan, masih kelas 4 Sekolah Dasar, tapi sudah sering diajak dan melihat ibunya berinteraksi dengan warga penderita TBC.

Soal anak-anaknya yang sepertinya mengikuti rutinitas sosialnya, Ibu Leley mengaku tidak pernah mengahayakan. "Sudah mendarah-daging. Hanya saja anak-anak saya mengikuti jejak ibunya dengan cara lain, lewat pendidikan formal dan ingin bekerja di rumah sakit," katanya.

Selama 29 tahun menekuni pekerjaan sosial itu, pernahkah Ibu Leley mendapatkan penghargaan dari pemerintah. "Tidak pernah," jawab Ibu Leley. Apakah pernah diberikan uang lelah? "Tidak pernah," kata Ibu Leley lagi, geleng-geleng kepala. Kenapa Ibu bersedia melakukan pekerjaan ini? "Saya melakukannya dengan tulus. Saya ikhlas ingin membantu," ucapnya.

Deretan pertanyaan di atas dijawab Ibu Leley tanpa berpikir lama. Ia seolah tidak peduli apakah pemerintah (Kota Mataram) pernah mendengar sepak terjangnya membantu para penderita TBC di kota ini. Ia melakukan semua itu tanpa pamrih. Sebagai kader umum yang aktif dan trampil, maka ia harus siap membantu. Ibu Leley tidak pernah mundur. Ketka banyak orang segan berdekatan dengan penderita TBC, karena alasan takut tertular, Ibu Leley malah tidak gentar. Puluhan tahun ia terus melakukan pendampingan terhadap penderita TBC.

Fathul Arifin dan Mujmal

Membela Warga Demi Dapatkan Raskin Bagus

Di Kota Mataram, cerita tentang beras miskin (raskin) tidak pernah putus. Unik memang. Cerita selalu berlanjut setiap dilakukan pendistribusian ke tangan terakhir, yakni rakyat selaku penerima. Meski cerita kadang berakhir manis, namun setiap akan didistribusikan topik cerita yang muncul selalu itu-itu saja; kualitas raskin yang jelek dan banyak kutunya.

Di Kelurahan Kebon Sari, misalnya. Mereka punya sosok penggerak yang memperjuangkan hak masyarakat di sana. Sekelompok orang sudah membentuk posko pengaduan yang akan membantu warga jika raskin yang diterima berkualitas buruk.

Dalam situasi ini, warga penerima akan menyerahkan sepenuhnya persoalan raskin kepada kelompok tersebut. Dalam kasus ini, kelompok pemantau raskin ini, segera melapor ke Bulog dan meminta pihak Bulog mengganti dengan raskin kualitas layak.

Sebetulnya, tuntutan mereka ke Bulog tidak muluk-muluk sekali. Mereka tidak minta Bulog mengganti dengan beras yang bagus-bagus amat.

Tuntutan mereka cuma, Bulog memberi beras yang layak untuk dimakan. "Alhamdulillah, setiap kami melakukan klaim ke Bulog, meski tidak semuanya berjalan mulus tapi pihak Bulog kadang bersedia mengganti," kata Fathul Arifin, koordinator Posko Pengaduan Kebon Sari.

Fathul Arifin yang akrab dipanggil Oting, mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada penerima raskin, sebenarnya sudah bagus. Artinya, selalu tepat waktu diterima masyarakat. "Boleh dikatakan pendistribusian tidak pernah terlambat ke tangan penerima," katanya.

Hanya saja persoalan yang seringkali terjadi, adalah menyangkut buruknya kualitas raskin tersebut. Menurut Oting, persoalan satu ini berulang-ulang terjadi. Pada akhirnya, ia dan kelompoknya juga

harus berkali-kali mendatangi Bulog untuk melapor dan menuntut penggantian raskin.

Oting tidak ingin menduga-duga, apa penyebab dari kasus yang berulang-ulang tersebut. Penasaran, Oting pernah mendatangi gudang Bulog yang berlokasi di Sweta. Sebelum raskin dikirim ke kelurahannya, Oting mengecek kualitas raskin tersebut. "Saat saya cek, kualitas raskinnya bagus, tidak kotor. Pokoknya baguslah. Tapi anehnya, ketika kami terima di kelurahan, kondisi beras malah kotor dan banyak kutu," ujarnya.

Oting bersama warga di lingkungannya, sempat kesal. Kendati berulang kali diprotes warga, kualitas raskin tetap saja buruk. Berwarna kuning, kutuan dan bau apek. Saking kesalnya, mereka kemudian melakukan penolakan terhadap puluhan karung beras Bulog. Raskin itu mereka biarkan tergeletak begitu saja di kantor Lurah. Beruntung pihak Bulog cepat tanggap dan segera melakukan penggantian sehingga keributan warga tidak berlarut-larut.

Dalam menyikapi persoalan raskin, Oting menyebut bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan kepala

lingkungan dan Lurah Kebon Sari. Kepedulian dia terhadap raskin jelek yang diterima penduduk di lingkungannya, telah dijalani sejak satu tahun lalu. Respon yang diberikan masyarakat, mereka sangat terbantu dan berharap Oting dan kawan-kawan tidak berhenti membantu mereka.

Di Kelurahan Dayen Peken, pengalaman sama juga diungkapkan Mujmal. Sama dengan apa yang dilakukan Oting, Mujmal pun akan bereaksi jika Bulog memberikan raskin jelek ke kelurahannya. "Kami tidak diam melihat persoalan ini. Jika ternyata kualitas raskin yang kami terima sangat jelek, yaaa....kami akan meminta Bulog untuk mengganti dengan raskin yang bagus," jelas Mujmal.

'Guna meminimalisir persoalan agar tidak terus-menerus terulang, Bulog diminta mengevaluasi sistem yang dijalankan selama ini. Artinya, Bulog harus melakukan penyempurnaan terhadap kualitas raskin yang didistribusikan.

Terhadap persoalan ini, Bulog juga disarankan perlu membangun mekanisme kontrol dan cek kelayakan secara akurat.



Mujmal



Fathul

Perempuan dan Kemiskinan dalam Perspektif Media

Oleh: Rudi Hidayat*

*Apa yang dikatakan, belum tentu didengar.
Apa yang didengar, belum tentu dimengerti.
Apa yang dimengerti, belum tentu disetujui.
Apa yang disetujui, belum tentu dilakukan.
Apa yang dilakukan, belum tentu menjadi kebiasaan.*

Perempuan dan Kemiskinan sering menjadi bagian dari pemberitaan media massa. Kemajuan dan kemajemukan tak mendorong perempuan dan kemiskinan terentaskan dengan sendirinya. Oleh karena itu media massa juga punya peran strategis untuk ikut menanggulangi kemiskinan dan kesejahteraan.

Sejak Orde Reformasi, media di Indonesia mengalami revolusi terutama budaya represif dan sensor oleh rezim Orde Baru. Perubahan iklim ini tidak diikuti dengan peningkatan Sumber Daya Manusia baik yang dilakukan oleh pribadi maupun oleh lembaga.

Kemampuan media untuk menggali, mengumpulkan, menyebarkan informasi agar massif dengan teknik yang variatif juga memperkaya untuk menganalisa persoalan lebih baik. Kemajuan dan kecanggihan teknologi digital juga semakin mendekatkan realitas dan kualitas hubungan antar warga.

Proses membangun yang tak lepas dari kritik dan otokritik merupakan upaya sehat menuju kehidupan yang demokratis dan dewasa. Peran media dalam pembangunan terutama membangun opini publik, kritik dan kontrol sosial merupakan upaya untuk memberi arah dan pedoman bagi pembangunan yang berkelanjutan dan lebih baik. Agenda seting media dalam pembangunan di Indonesia baik itu pembangunan daerah maupun pembangunan nasional masih belum optimal. Media bukan hanya jadi corong kampanye bagi kelompok tertentu bahkan kelompok pemodal dan pemilik media namun sangat jarang media menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat.

Penguatan media hendaknya dilakukan untuk lebih mendekatkan media dengan masyarakatnya, menguatkan jaringannya dan menguatkan fungsinya.

Sehingga media punya peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga yang masih tertinggal dan berada di bawah garis kemiskinan. Sementara internalisasi merupakan proses kesadaran berpikir, bertindak dan identifikasi diri sesuai dengan kepercayaannya. Proses ini biasanya merupakan hasil dialog atau pembelajaran, namun tak jarang juga melalui beragam metode hegemoni misalnya melalui agitasi dan propaganda yang tak jarang disertai subordinasi, marginalisasi dan bar. Bila proses pembelajaran massal dikenal dengan indoktrinasi, memaksakan pemikiran tertentu dan ini merupakan bagian dari kekerasan. Orang yang mengalami internalisasi prilakunya sesuai dengan keyakinannya, jadi menjadi kebiasaan.

Bagi saya, persoalan ketimpangan gender dan kemiskinan bersifat structural yang diproduksi serta direproduksi sejarah panjang. Sistem, cara produksi (mode of production), formasi dan struktur social yang ada dan berkembang saat ini harus dirubah melalui transformasi pada system social yang anti kemiskinan dan ramah keadilan gender. Memahami persoalan yang demikian, tentulah kita memahami bagaimana sebenarnya posisi media dan juga aparat Negara ditengah system yang dominan saat ini. Hampir mustahil tanpa suatu perjuangan merubah system akan melahirkan kebijakan yang sensitive terhadap ketidakadilan gender dan anti kemiskinan. Pendidikan dan politik pembangunan yang ada dihegemoni oleh pikiran pikiran yang melestarikan kesenjangan kemiskinan dan ketidakadilan gender. Strategi Media Membangun Kesadaran

Di tengah industrialisasi media saat ini, sekalipun terbatas kita masih memiliki ruang untuk memperjuangkan kesadaran baru.

Peluang terbatas ini tentu membutuhkan ketekunan dan strategi yang memadai untuk menciptakan opini yang menggerakkan. Media saat ini yang dapat digunakan sekalipun terbatas adalah media massa baik yang komersial maupun media sosial dengan beragam bentuknya.

1. Menyiapkan SDM dalam rangka menggunakan media sebagai arena perjuangan, perang wacana, opini dibutuhkan sumberdaya yang memahami mengenai media yang akan digunakan, media massa mulai cetak, audio, visual, video, social dan lainnya memiliki karakteristik dan perilaku sendiri. Selain memahami pengetahuan dan keterampilan teknis masing-masing media, selayaknya mempunyai pengetahuan social yang memadai sehingga substansi materinya menyentuh langsung perbedaan cara pandang dan tujuan menciptakan transformasi.

2. Menciptakan opini. Opini yang dibangun bisa dimulai dari wacana, kasus atau realitas yang ada dan eksis ataupun manifest. Kegiatannya berupa pembuatan artikel dengan beragam sudut pandang, membuat press release atau konferensi pers, demonstrasi, serta mensosialisasikan beragam bentuk kegiatan dengan media yang beragam. Setidaknya surat pembaca yang massif misalnya.

3. Menggerakkan kepedulian. Setelah opini mulai diterima masyarakat maka saatnya menggerakkan daalam bentuk kepedulian baik dukungan langsung maupun melalui simbolik yang tidak langsung. Yang terakhir ini disamping untuk memperluas dukungan juga mengabstraksikan dalam kerangka sistemik.

4. Aksi Perubahan. Tahapan berikutnya adalah melakukan tindakan berhadapan dengan situasi yang ingin dirubah dengan berbagai cara dari yang bersifat model hingga alternative kebijakan ataupun tindakan protes.

Dan satu hal lagi yang ingin saya tambahkan bahwa seharusnya ada kontinuitas silaturahmi multistakeholder sehingga berbagai persoalan dan komunikasi terbangun sejajar. (*)

Membangun Gerakan Advokasi Berbasis Komunitas (Di kota Mataram)

Oleh; Wahid jan.

I. Pendahuluan;

Berbagai persoalan yang dialami masyarakat Kota Mataram sangatlah kompleks, mulai dari kemiskinan, pengangguran, sampai pada aspek pelayanan publik yang buruk. Kota Mataram dengan jumlah penduduk 419.000 jiwa dengan kemiskinan sebesar 10,75% atau sebanyak 46.670 Jiwa dengan tingkat garis kemiskinan berada pada angka Rp 359.65. (BPS Kota Mataram Tahun 2013).

Jika di pandang dalam aspek kuantitas tentunya angka kemiskinan yang dialami penduduk Kota Mataram mengalami kecenderungan menurun, namun dalam aspek kualitas kemiskinan yang terjadi sangatlah besar, karena ketidak mampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya data BPS hanya bersandar pada aspek pangan dan papan, namun kebutuhan mendasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan penduduk masih terabaikan.

Pemenuhan kebutuhan tersebut masih berkuat pada aspek prosedural dan pelayanan yang sering kali bersoal dan masih jauh dari aspek kwalitas pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Adalah menjadi cerita umum dikalangan masyarakat "Miskin" Kota Mataram bahwa segenap bantuan sosial yang didapatkan sering membuat masalah baru dan masalah tersebut menjadi beban antar masyarakat. Misalnya saja dalam program Raskin dan BPJS, Adminduk, gizi buruk, kesehatan Lingkungan, dan seterusnya.

Jika dipandang dalam kacamata kebijakan publik maka setidaknya ada beberapa hal yang patut untuk kita persoalkan, diantaranya adalah: pertama apakah kebijakan pembangunan Kota Mataram telah berdasarkan pada/berbasis masyarakat miskin...? kedua: bagaimana aparat pemerintah dalam menjalankan program/kebijakan tersebut...? Ketiga; bagaimana program yang di buat atas kebijakan tersebut...apakah tepat sasaran atau tidak..?

II. Kebijakan pembangunan yang Berbasis Masyarakat Miskin.

Sebagai kendala yang sering kita jumpai dalam lambatnya peningkatan kerja

pembangunan masyarakat miskin di Kota Mataram adalah belum adanya payung hukum yang serius dalam bentuk kebijakan pemerintah yang terfokus dalam menyelesaikan soal kemiskinan dan ketidak berdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Ada beberapa kebijakan makro yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat mulai dari RPJM-RPJP sampai pada PERDA yang belum focus untuk mengurus soal-soal kemiskinan masyarakat kota. Sehingga urusan kemiskinann selalu saja menjadi bagian/sub ordinat dari program pembangunan di semua SKPD. Hal ini jelas akan menjadi tidak jelas target dan hasil yang akan dicapai.

Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan keputusan Gubernur Nomor 358 Tahun 2010 tentang pembentukan tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Provinsi NTB) yang dipimpin oleh Wakil Gubernur sebagai ketua dan sekretarisnya Kepala Bappeda dan anggotanya adalah bebagai SKPD dan stakeholder terkait. Namun sayangnya Keputusan Gubernur tersbut masih belum tersambut dengan cepat oleh para Bupati/Wali kota untuk bergerak cepat melakukan kerja pemebentukan Tim yang sama karena kantong kemiskinan ada di daerah Kabupaten/Kota.

Sangat sayang jika asumsi penulis menjadi benar karena kemiskinan masyarakat perkotaaan akan menjadi objek proyek pembangunan yang tidak akan berkesudahan.

III. Aparat Pemerintah yang Menjalankan Program Pembangunan yang lemah kuantitas dan Kualitas?

Dalam pengelolaan pembangunan yang bebrbasis pada kondisi masyarakat miskin perkotaan sudah tentu dilengkapi dengan sumber daya manusia aparat pelaksana dalam kondisi yang cukup profesional dan mempuni dalam bidangnya, serta memiliki sence of poor people. Karena secara konsep dan ataupun teoritik dalam hal penanggulangan kemiskinan akan bermuara pada aspek pelaksanaannya atau eksekusi dari kebijakan tersebut.

Ada banyak akibat yang muncul ketika aparat pelaksana kebijakan yang setengah paham dan kurang visioner dalam menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan masyarakat perkotaan, salah satunya adalah dipastikan program kerja atas kebijakan tersebut menjadi tidak optimal serta hasil yang minim. Kerja dengan sikap yang masih egosentris harus ditanggalkan oleh masing-masing SKPD, karena tidak jarang ditemukan adanya SKPD yang paling bertanggung jawab atas program penanggulangan kemiskinan masyarakat sehingga muncul penyakit-penyakit subjektifitas sektoral..padahal urusan kemiskinan telah menjadi urusan banyak pihak.

Misalkan, Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Provinsi NTB yang di bentuk berisikan para pejabat yang bersal dari eselon II, III yang memiliki aktifitas kerja cukup banyak sehingga menyulitkan pembagian kerja yang lebih focus dan intens atas program-program yang membutuhkan percepatan kerja. Sehingga menjadi tidak efektif dalam melaksanakan tugas di dalam Tim. Seharusnya di isi oleh personel yang memiliki kapasitas professional dan waktu kerja lebih terfokus (hasil penelitian Dr. Mu-haimin FH Unram).

IV. Gerakan ADVOKASI Pilihan Dalam Menjawab Tantangan.

Kebijakan yang seringkali tidak memihak pada masyarakat miskin niscaya akan melahirkan kesadaran kritis untu melakukan advokasi. Dalam beberapa masalah social ekonomi di tanah air, gerakan advokasi atas kebijakan pemerintah untuk mengubah kebijakan terebut agar lebih berpihak pada masyarakat miskin tela sering di lakukan.

Komunitas – komunitas social menjadi pilar penting dalam melakukan gerakan advokasi. Tentunya dengan bebrabagi prasyarat baik secara internal maupun eksternal. Karena advokasi yang dilakukan dengan serampangan akan melahirkan istilah "gerakan gerombolan protes".



PANELIS: Anggota DPRD NTB dari FPP, Dra Hj Wartiah dalam Aksi Kolektif.



SUPPPORT: Ketua DPRD Kota Mataram, H didi Sumardi menyambut dan mengawal berdirinya Forum Aspirasi



ANGKAT BICARA: Anggota DPRD Kota Mtaram Hj Baiq Miradiati memberikan masukan tentang Pembangunan



Penyerahan Nota Aspirasi kepada ketua DPRD Lombok Timur



ANTUSIAS : Peserta dialog publik antusias mendengarkan pemaparan



ORASI: Ketua Forum Aspirasi Kota Mararam Ir Anis memulai orasinya.



Peserta paling aktif dalam dialog publik mendapat hadiah dari panitia



POSE : Setelah terbentuk pengurus Forum Aspirasi Kota Mataram pose bersama dengan peserta di Hotel Fave.



MASUKAN: Untuk kemajuan Forum Aspirasi Kota beberapa masukan disampaikan peserta dialog.



Selamat Datang



ARAHAN: Tokoh vokal DPRD Kota Mataram ambil bagian pembentukan Forum Aspirasi Kota Mataram.



LOMBA: Ibu Walikota Mataram, Sumarni Akhyar mencicipi masakan lomba masak.



KRITIS: Masukan dan program disampaikan untuk kegiatan Forum Aspirasi warga Kota Mataram.



BUSANA SASAK: Generasi penerus bangsa berbusana Sasak nan agung,



BPJS : Jaminan Sosial Kesehatan dari BPJS disosialisaikan untuk warga Kota



SERIOUS: Peserta dialog nampak serius mendengarkan pemaparan nara sumber.

MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Ketua Panitia Diskusi Publik (Nurjannah_Koor Bakti NTB)

Ketua Panitia Diskusi Publik, Nurjannah yang juga Koordinator Bakti NTB mengatakan kegiatan ini merupakan kerja bareng dan komitmen dari 5 lembaga Mitra Mampu (Maju perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan), diantaranya Pekka, Bakti, LPSDM, KPI dan PPK. "MAMPU adalah salah satu program yang mengusung untuk penuntasan dan pengentasan kemiskinan terhadap perempuan yang wilayah kerjanya di KLU, Lombok Timur, Kota Mataram, Lombok tengah, Lombok Barat dan hampir di 10 kab/kota NTB dimana KPI dengan balai perempuan, PPK dengan dampingan wilayah buruh migrant, Pekka dengan memperjuangkan perempuan untuk mendapatkan identitas hukum, LPSDM komitmen dengan mengawal proses gender Audit dan Kami Bakti berkomitmen untuk mendampingi dan melakukan asistensi terhadap anggota konstituen perempuan untuk melancarkan anggaran yang pro gender dan pro kemiskinan," katanya.

Ada 5 isu besar Mampu (Maju perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan) yaitu:

1. Membuka akses perempuan miskin kepada program perlindungan social pemerintah
2. Membuka akses perempuan kepada pekerjaan dan menghapuskan diskriminasi di tempat kerja



Dra Hj Wartiah memaparkan tentang peran politisi perempuan

3. Meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan ke luar negeri
4. Meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk kesehatan reproduksi yang lebih baik
5. Meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Gubernur NTB yang diwakili oleh t Asisiten III HL M Safi'l, MM

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua peserta yang hadir dalam acara diskusi public.

A. Gubernur NTB yang diwakili Asisten III, HL M Syafi'e menyambut baik acara diskusi public sebagai rangkaian dari Hari Perempuan Internasional tahun 2015.

"Ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama untuk membangun daerah kita ini serta harapan besar kami agar kerjasama ini terus terjalin sebagai bagian ikhtiar kita bersama untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Menurut data BPS Jumlah penduduk perempuan di Pulau Lombok adalah sebesar 70,38% dari jumlah penduduk 3,2 juta jiwa, dimana di Pulau Sumbawa jumlah laki-laki jauh lebih banyak dari jumlah perempuan. Hal ini menunjukkan kaum perempuan memiliki potensi dari SDM pembangunan untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan dalam pembangunan.

Permasalahan yang mendasar yang sering terjadi selama ini adalah partisipasi perempuan dalam pembangunan sangat rendah, ini terjadi kesenjangan dengan partisipasi kaum laki-laki dan partisipasi perempuan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan status perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar. Kondisi tersebut berdampak kepada rendahnya kualitas perempuan disebabkan posisi secara politik dan ekonomi serta sosial budaya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dimasyarakat sampai saat ini masih cukup tinggi, data menunjukkan bahwa di Kota Mataram pada semester pertama tahun 2014 terjadi penurunan jumlah kasus dari 88 kasus tahun 2013 menjadi 59 kasus tahun 2014 di Kota Mataram. Sedangkan di Lombok Timur menunjukkan fenomena yang sama, pada tahun 2013 kasu yang terlapor sebanyak 161

Tabel 1

KAB/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
LOBAR	15,22	27,11
LOTENG	19,18	30,01
LOTIM	10,15	20,74
SUMBAWA	7,33	11,27
DOMPU	8,75	15,32
BIMA	7,92	15,69
KSB	4,57	10,47
KLU	17,52	29,78
MATARAM	3,86	11,49
KOTA BIMA	3,09	9,28
LAKI-LAKI	11,26%	
PEREMPUAN	20,83%	

Tabel 2

MASALAH YANG DIHADAPI PEREMPUAN PADA UMUMNYA	
}	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
}	KORBAN TRAFICKING (PERDAGANGAN MANUSIA)
}	MENGURUS ANAK SENDIRI
}	MENJADI JANDA MALAYSIA
}	PENDIDIKAN RENDAH
}	KORBAN SEKS BEBAS
}	KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
}	PARTISIPASI POLITIK RENDAH

Kondisi ini menjadu suatu hal yang perlu disosialisasikan secara massif guna membangun kesadaran “zero tolerance” terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Dra. Hj. Wartiah, M.Pd Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB dengan makalah Mewujudkan Anggaran Berperspektif Gender dan Kemiskinan menyatakan dari anggota DPRD Provinsi NTB berjumlah 65 Anggota, Hanya 6 Anggota yang Perempuan Prosentasenya 9,23 %. Padahal kita Tahu bahwa didalam pencalonan itu harus mengikutsertakan 30 % minimal Keterwakilan perempuan disetiap Partai Politik. DPRD merupakan lembaga pengambil kebijakan maka sangat besar pengaruh apabila semakin banyak Perempuan yang terjun ke Dunia Politik agar tidak hanya menjadi pelengkap Penderita. Anggota Dewan Merupakan Policy Maker.

Melihat banyaknya masalah yang dihadapi (tabel 2) oleh perempuan pada umumnya maka perlu kemudian melalui badan pemberdayaan perempuan bisa kemudian memberikan anggaran yang lebih dari yang ada sekarang ini, kemana kita gunakan anggaran itu

Pelatihan-pelatihan untuk perempuan-perempuan. Pertama, penyuluhan tentang berbagai hal untuk menjawab tantangan hidup saat ini. Kedua, bantuan modal lunak menjadi wirausaha. Ketiga, bantuan hukum bagi para perempuan yang tersandung masalah hukum. Keempat, maka dari permasalahan diatas, maka penting juga di dorong dalam pengalokasian anggaran yang berpihak kepada perempuan.

Hj. Diyah Ratu Ganefi SH (Anggota DPD Komite III), Upaya Memperjuangkan persoalan daerah ke pusat Fungsi dan tugas DPD RI adalah pengawasan, dimana ketika ada anggaran dan kegiatan dari pusat itu yang bisa kami awasi. Secara nasional sudah mencapai 29

orang adalah perempuan dimana DPD RI banyak aspirasi dan tidak semua bisa langsung di eksekusi. Dimana DPD RI tidak ada anggaran budgeting dan kami juga rapat dengan beberapa kementerian dimana DPR dan DPD itu sama, maka dengan sendirinya kami di DPD kami sudah ikut terlibat dalam pembahasan UU.

“Kami juga turun ke lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat dan kami akan membawa ke aspirasi tersebut ke pusat seperti Kasus jeranjang, asus Sumiati dan masalah TKI kami selalu memantau dan mengawasinya,” katanya.

Kami di DPD tidak memiliki anggaran, maka teman-teman bisa berkoordinasi dengan teman-teman di DPRD. Ada juga IPM yang rendah, kita di NTB sangat sulit untuk mengejar kenaikan IPM maka saya harapkan bersama ibu-ibu untuk anggaran ini bisa terserap.

Sistri Sembodo, Kepala BPJS Kantor Wilayah Mataram Provinsi NTB mengatakan dimana yang paling memperhatikan kesehatan adalah para ibu-ibu, maka ibu-ibu akan kebingungan terkait kesehatan. Ini adalah program pemerintah karena menggunakan anggaran pemerintah, maka ini akan menjadi akses untuk layanan public.

Ada tiga hal yang penting diketahui terkait Layanan public, yaitu:

- Anggaran terbatas
- Sumberdaya terbatas
- Harapan peserta tidak terbatas

Maka bagaimana layanan public itu maksimal dengan itu peserta harus memahami hak-haknya dan kewajiban sebagai peserta.

Program ini ada 3 asas besar, yaitu asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan social dari seluruh rakyat Indonesia, dimana dalam perlindungan sesuai dengan amanat UU 40 tahun 2004 ada program yang disusun, salah satunya adalah jaminan kesehatan maka selambat-lambat 1 Januari 2019 seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat kan jaminan kesehatan.

5 program yang disusun, yaitu:

- Jaminan Kesehatan
- Jaminan Kecelakaan Kerja
- Jaminan Hari Tua
- Jaminan Pensiun
- Jaminan Kematian



AKTIF: Nurul Utami memperjuangkan PRT.



Warga Dasan Agung Kota Mataram membuat dan menikmati lezatnya tahu fantasi bersama keluarga

MENIKMATI TAHU FANTASI

Sepintas mirip kue dan sedap dipandang. Tapi beegitu kita cicipi dan kita kunyah pelan-pelan rasa tahu lembut terasa menyapa di lidah.

Tentu tahu ini tak beda dengan tahu lainnya atau tahu isi yang membedakan rasa dan rasa telur dan tepungnya. Kalau makan tahu ini kita iajak berfantasi seperti makan kue dan nikmat.

Tapi bagi yang tak suka fantasi boleh saja ditambahi sambel colek atau sambal botol. Sehingga rasa pedas akan mengukur ketahanan bibir Anda. Tapi kalau tidak suka sambel colek atau sambal botol, silakan ambil cabe rawit, kecap dan makan dengan tahu fantasy ini, hmmm selamat mencoba.

Bahan-bahan :

1. 10 buah tahu dihaluskan
2. 1 buah wortel dipotong dadu halus
3. Daun Seledri secukupnya dicincang halus
4. 10 butir telur puyuh
5. 2 butir telur ayam ras

6. 4 sdm tepung panir

7. Minyak goreng

Cara Membuat :

1. Tahu, wortel, seledri, dan telur ayam ras dicampur menjadi satu
2. Kemudian letakkan dicetakan dan beri telur puyuh di atasnya atau di dalam adonan tahu tersebut
3. Kukus hingga matang
4. Angkat dari cetakan dan lumuri tahu dengan putih telur dan tepung panir
5. Goreng hingga berwarna kecoklatan
6. Angkat dan hidangkan dengan bubmbu kecap atau cabe rawit.

Nilai Gizi perpersi :

Energi	: 190 kkal
Protein	: 9 g
Lemak	: 11,6 g
Karbohidrat	: 13 g



Berita kegiatan MAMPU sub office NTB yang diliput berbagai media cetak

5 ISU MAMPU

**MAJU PEREMPUAN INDONESIA UNTUK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Membuka akses perempuan miskin kepada program perlindungan sosial pemerintah

Membuka akses perempuan kepada pekerjaan dan menghapuskan diskriminasi di tempat kerja

Meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan ke luar negeri

Meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk kesehatan reproduksi yang lebih baik

Meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan